

## ANALISIS SILPA APBD DAN ARUS KAS DALAM PENGGUNAAN BELANJA MODAL DI PEMERINTAH KABUPATEN KARO

Oktarini Khamilah Siregar, SE, M.Si

Ruth Jubelia Ginting

Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi

### ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui kontribusi SILPA dan Arus Kas dalam penggunaan Belanja Modal di Pemkab Karo. Sampel adalah Bendahara Daerah (BUD) Karo berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari tahun 2010 sampai 2015. Pendekatan penelitiannya adalah pendekatan penelitian deskriptif dengan melakukan analisis Kontribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Revenue Funding* adalah SiLPA yang memiliki kontribusi kecil terhadap pendanaan Belanja Modal. Sedangkan arus kas memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pendanaan Belanja Modal dengan persentase di atas 100%.

Kata kunci: Anggaran Sisa (SiLPA), Arus Kas, Tahun Anggaran, Penggunaan Belanja Modal

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam era desentralisasi fiscal pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri diharapkan dapat mendukung terjadinya peningkatan pelayanan di berbagai sector terutama sector publik. Peningkatan pelayanan di sector public antara lain mencakup tersedianya sarana/prasarana. Ketersediaan sarana/prasarana tersebut oleh pemerintah daerah tersedia/di alokasikan dalam belanja modal. Oleh sebab itu, dari berbagai jenis anggaran belanja daerah. Secara spesifik sumber untuk pendanaan Belanja Modal belum ditentukan aturannya, namun seluruh jenis Penerimaan Daerah dapat dialokasikan untuk mendanai belanja daerah yang diantaranya adalah Belanja Modal, selain itu sumber dana untuk pendanaan Belanja Modal bersumber dari pembiayaan daerah yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (Permendagri 13 Tahun 2006). SiLPA yang ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Karo secara menyeluruh berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Arus Kas juga menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban berupa pokok utang dan bunga kepada pemerintah pusat (sebagai akibat dari penerusan pinjaman) atau membantu dalam penilaian risiko variabilitas keuangan jika misalnya pemerintah daerah menerbitkan obligasi (*municipal bonds*). SiLPA di Kabupaten Karo pada tahun anggaran 2010-2015 belum optimal dalam penggunaannya dilihat dari masih minimnya pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Karo, Kondisi SiLPA yang belum optimal penggunaannya tersebut juga menjelaskan bahwa SKPD belum melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan secara baik.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kontribusi SiLPA dan Arus Kas dalam penggunaan Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Karo?

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010). Belanja modal

adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan *output* berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat (seperti jalan, jembatan, trotoar, gedung olah raga, stadion, *jogging track*, halte, dan rambu lalu lintas) dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor pemerintahan). Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penganggaran belanja modal adalah belanja ikutan setelah aset tetap diperoleh, yakni belanja operasional dan pemeliharaannya aset tetap bersangkutan. Untuk itu, perlu dilakukan penghitungan yang cermat agar nantinya tidak membebani anggaran berupa pengurangan atas alokasi anggaran untuk bidang/sector lain. Dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal adalah jenis belanja langsung yang dapat digunakan untuk membiayai penyediaan aset dan juga sarana dan prasarana untuk kepentingan pemerintah maupun publik.

Secara spesifik sumber pendanaan untuk Belanja Modal belum ditentukan aturannya. Namun seluruh jenis sumber-sumber penerimaan daerah dapat dialokasikan untuk mendanai Belanja Daerah yang salah satunya adalah Belanja Modal. Sumber-sumber penerimaan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004) yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan Belanja Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan yaitu: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Lain-Lain pendapatan yang sah yaitu: Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana cadangan daerah, dan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## 2. Laporan Keuangan Pemerintah

Sesuai dengan SAP yang berlaku saat ini adalah SAP yang berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 tahun 2010 (PP 71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana berdasarkan penjelasan dari peraturan tersebut Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Laporan Keuangan Pokok terdiri dari yang pertama, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Realisasi Anggaran menyajikan unsur-unsur adalah Pendapatan LRA, Belanja, Transfer, Surplus/defisit LRA, Pembiayaan dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Kedua, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ( Laporan Perubahan SAL) menyajikan unsur-unsur Saldo anggaran lebih awal periode, Penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan Saldo anggaran lebih akhir periode. Ketiga adalah Neraca, keempat adalah Laporan Operasional (LO). Kelima Laporan Arus Kas (LAK) dan keenam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan pos-pos, Ekuitas awal, Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

## 3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. SiLPA merupakan salah satu sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit APBD akibat dari usaha peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai penjelasan dalam PMK No.45/PMK.02/2006.

Jika SiLPA daerah cukup besar dan diperkirakan mampu membiayai seluruh Belanja Modal Daerah maka untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik tidak harus menunggu bantuan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Dana Transfer dapat dialokasikan untuk belanja operasional dan belanja tak terduga daerah.

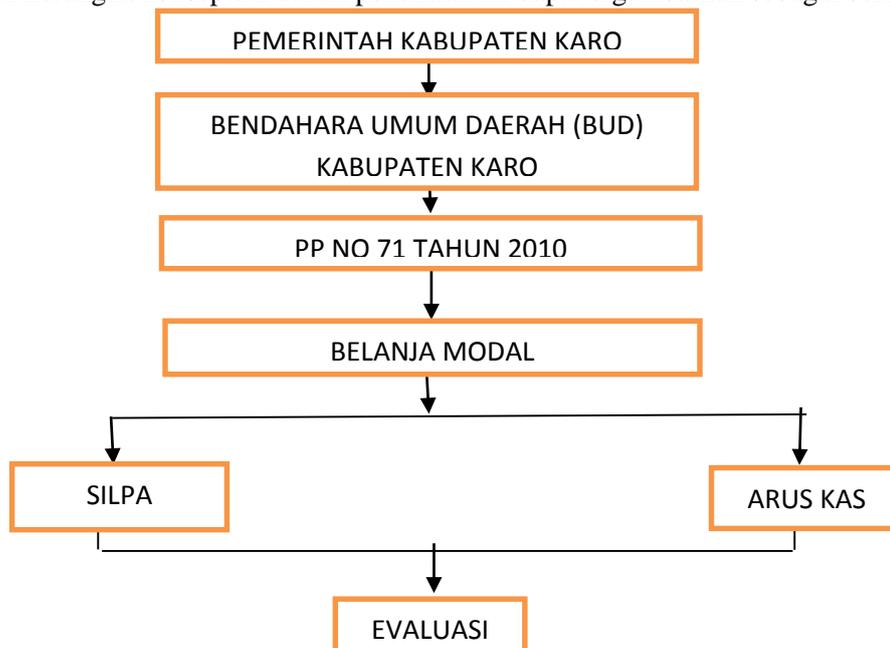
4. Arus Kas

Menurut PSAP No. 03 Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Arus Kas terdiri dari Aktivitas Operasi, Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari Penerimaan Perpajakan; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Penerimaan Hibah; Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya; dan Transfer masuk. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran : Belanja Pegawai; Belanja Barang; Bunga; Subsidi; Hibah; Bantuan Sosial; Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan Transfer keluar. Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Nonanggaran

**B. Kerangka Konseptual**

Sebagai daerah yang otonom, pemerintah daerah diberikewenangan yang luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangganya sendiri untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah diatur oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP yang berlaku sekarang adalah SAP berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Fungsi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Gambaran penyerapan anggaran berdasarkan laporan SKPD setiap tahunnya hanya mencapai sekitar 65-75%. Penyerapan itu meliputi belanja pegawai atau pengeluaran rutin dan belanja non-pegawai atau kegiatan pembangunan. Penyebab rendahnya penyerapan anggaran diindikasikan karena sebagian besar kegiatan pembangunan, baik pengadaan barang dan jasa (konstruksi), masih dalam proses perampungan. Secara administrasi kegiatan itu sudah menyerap anggaran. Besar kecilnya penyerapan anggaran dipengaruhi oleh terlaksananya program/kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akan berdampak pada pemenuhan komposisi jumlah belanja pada periode berikutnya.

Jika SiLPA daerah cukup besar dan diperkirakan mampu membiayai seluruh Belanja Modal Daerah, maka untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik tidak harus menunggu bantuan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Selain itu, dengan adanya dukungan Informasi arus kas sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang maka akan dapat dilakukan evaluasi seberapa besar kontribusi SiLPA dan Arus Kas terhadap penggunaan Belanja Modal. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

### C. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Terdapat Kontribusi SiLPA dan Arus Kas dalam penggunaan Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Karo.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menganalisis kontribusi variable independenya itu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Arus Kas terhadap variable dependen yaitu Belanja Modal.

### B. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

#### 1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2013:115). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Karo. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2013:116). Sampel pada penelitian ini adalah Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Karo berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari tahun 2010 hingga 2015.

#### 2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain. Dimana data penelitian berupa Data SiLPA, Arus Kas dan Belanja Modal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo tahun 2010 sampai dengan 2015 yang diperoleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Karo.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional dan pengukuran variable dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel	Deskripsi	Skala
SILPA ( $X_1$ )	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Besarnya SiLPA dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Karo pada bagian pembiayaan TA 2010-2015	Nominal
Arus Kas ( $X_2$ )	Menurut PSAP No. 03 Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/ Daerah. Khususnya dalam hal penelitian ini, kondisi arus kas yang menunjukkan gambaran Belanja Modal adalah Arus Kas Keluar TA 2010-2015	Nominal
Belanja Modal (Y)	Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset (Permendagri 13 Tahun 2006) Besarnya belanja modal dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Karo pada bagian belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik TA 2010-2015	Nominal

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karo. Selain itu peneliti juga melakukan kepustakaan melalui buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah Penelitian deskriptif dengan menggunakan Teknik Analisis Kontribusi, dimana teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat diberikan dari SiLPA dan Arus Kas guna mendanai Belanja Modal. Perbandingan yang digunakan adalah besarnya jumlah SiLPA dan Arus Kas terhadap Belanja Modal. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi menurut Abdul Halim (2005:163) adalah :

$$P_{n_{1..n}} = ( QX_{n_{1..n}} / QY_{n_{1..n}} ) \times 100\%$$

Ket:

$P_{n_1}$	=	Kontribusi SiLPA
$QX_{n_1}$	=	Jumlah SiLPA APBD untuk belanja Modal
$QY_n$	=	Belanja Modal
$P_{n_2}$	=	Kontribusi Arus Kas
$QX_{n_2}$	=	Jumlah Dana Arus Kas
$QY_n$	=	Belanja Modal

Identifikasi pengklasifikasian kriteria kontribusi adalah sebagai berikut :

- 80% - 100% = Sangat Besar
- 60% - 79% = Besar
- 40% - 59% = Cukup Besar
- 20% - 39% = Cukup
- 0% - 19% = Kecil

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan (SiLPA) merupakan sumber penerimaan internal Pemda yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Bentuk penggunaan SiLPA ada dua, yakni untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya (luncuran) dan membiayai kegiatan baru yang tidak teranggarkan dalam APBD murni, yang dimaksud dengan kegiatan lanjutan dan kegiatan murni adalah :

##### a. Kegiatan Lanjutan

Kegiatan lanjutan atau luncuran dari tahun sebelumnya dilaksanakan pada awal tahun berjalan dengan menggunakan sisa anggaran yang belum habis dengan terlebih dahulu menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Lanjutan pada akhir tahun sebelumnya.

##### b. Kegiatan Baru

Dalam perubahan APBD, penambahan kegiatan baru dimungkinkan sepanjang dapat diselesaikan sampai pada akhir tahun anggaran, kecuali dalam keadaan mendesak atau darurat. Berikut adalah data mengenai SiLPA di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2010-2015 :

**Tabel 4.1 SiLPA Kabupaten Karo Tahun 2010-2015**

TAHUN	JUMLAH (Rp)
2010	90.192.898.547,97
2011	87.056.467.841,44
2012	59.911.419.786,79
2013	62.901.983.640,00
2014	70.562.342.863,62
2015	192.660.598.081,89

Sumber :Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, DPPKAD Kab.Karo, 2016

#### 2. Arus Kas

Besarnya jumlah arus kas yaitu total dari keseluruhan pendapatan dan penerimaan pembiayaan dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai belanja daerah, baik itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Arus Kas diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal pembiayaan guna menambah jumlah aset tetap di daerah yang dialokasikan dalam bentuk Belanja Modal. Berikut adalah data mengenai Arus di Kabupaten Karo Tahun

Anggaran 2010-2015 :

**Tabel 4.2 Arus Kas Kabupaten Karo Tahun 2010-2015**

TAHUN	JUMLAH (Rp)
2010	674.964.354.106,44
2011	737.316.697.173,79
2012	813.300.262.762,96
2013	817.233.443.750,51
2014	1.082.639.526.531,90
2015	1.470.422.718.815,90

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, DPPKAD Kab.Karo, 2016

### 3. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dengan kata lain Belanja Modal dilakukan dalam rangka penambahan modal yang menambah aset tetap/inventaris yang memiliki nilai lebih dari satu periode akuntansi. Berikut adalah data Belanja Modal Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2010-2015 :

**Tabel 4.3 Belanja Modal Kabupaten Karo Tahun 2010-2015**

TAHUN	JUMLAH (Rp)
2010	92.129.440.832,00
2011	128.447.914.559,00
2012	153.195.511.970,00
2013	245.358.709.245,00
2014	155.665.020.656,27
2015	300.098.182.224,30

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, DPPKAD Kab.Karo, 2016

### 4. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis SiLPA APBD dan Arus Kas dalam Penggunaan Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Karo, maka dilakukan uji hipotesis analisis kontribusi sebagai berikut :

#### a. Analisis Kontribusi SiLPA terhadap Belanja Modal

SILPA merupakan salah satu sumber penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk mendanai Belanja Modal adalah

1. Thn Anggaran 2010 =  $(4.652.978.500 / 92.129.440.832) \times 100\% = 5,05\%$
2. Thn Anggaran 2011 =  $(11.274.788.000 / 128.447.914.559) \times 100\% = 8,78\%$
3. Thn Anggaran 2012 =  $(0 / 153.195.511.970) \times 100\% = 0,00\%$
4. Thn Anggaran 2013 =  $(0 / 245.358.709.245) \times 100\% = 0,00\%$
5. Thn Anggaran 2014 =  $(4.343.054.076 / 155.665.020.656,27) \times 100\% = 2,79\%$
6. Thn Anggaran 2015 =  $(190.674.074.900 / 300.098.182.224,30) \times 100\% = 65,53\%$

#### b. Analisis Arus Kas terhadap Belanja Modal

Besarnya dana Arus Kas yaitu Pendapatan ditambah dengan Penerimaan Pembiayaan diharapkan dapat memberikan Kontribusi yang besar untuk mendanai Penambahan Aset tetap terutama di Bidang Infrastruktur di Kabupaten Karo, untuk melihat besarnya Kontribusi Arus Kas terhadap penambahan aset tetap/Belanja Modal, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Thn Anggaran 2010 =  $(92.129.440.832 / 674.964.354.106,44) \times 100\% = 13,65\%$
2. Thn Anggaran 2011 =  $(737.316.697.173,79 / 128.447.914.559) \times 100\% = 574,02\%$
3. Thn Anggaran 2012 =  $(813.300.262.762,96 / 153.195.511.970) \times 100\% = 530,89\%$
4. Thn Anggaran 2013 =  $(973.156.059.802,13 / 245.358.709.245) \times 100\% = 396,63\%$
5. Thn Anggaran 2014 =  $(1.082.639.526.532,01 / 155.665.020.656,27) \times 100\% = 695,49\%$
6. Thn Anggaran 2015 =  $(1.470.422.718.815,90 / 300.098.182.224,30) \times 100\% = 537,75\%$

## B. Pembahasan

### 1. Kontribusi SiLPA dalam Penggunaan Belanja Modal

Dari hasil analisis kontribusi dari tahun 2010-2015 diketahui bahwa Jumlah Dana SILPA APBD yang digunakan untuk mendanai Belanja Modal paling besar adalah pada tahun 2015 sebesar 65,53% yaitu untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Pasca Bencana Erupsi Gunung

Sinabung, untuk tahun 2014 sebesar 2,79 % yaitu untuk Bantuan Pendidikan, Rehab dan Pembangunan Gedung Kantor, Pengadaan Komputer, Mebeulair dan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional. Untuk Tahun 2013 dan 2012 tidak terdapat penambahan aset tetap yang didanai oleh SILPA APBD. Untuk Tahun 2011 sebesar 8,78 % yaitu untuk mendukung pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Pembangunan Pasar di Kecamatan Tigapanah, dukungan terhadap Program Pengemangan Destinasi Pariwisata dan dukungan terhadap Program peningkatan produksi perikanan. Untuk Tahun 2010 yaitu sebesar 5,05% yaitu untuk Pembuatan Pagar SD yang terdapat di beberapa kecamatan di Kabupaten Karo selain itu juga digunakan untuk pengadaan alat-alat komunikasi, mebeulair, komputer dan pengadaan alat-alat studio.

## 2. Kontribusi Arus Kas dalam Penggunaan Belanja Modal

Dari hasil analisis kontribusi dari tahun 2010-2015 diketahui bahwa Jumlah Dana Arus Kas yang digunakan untuk mendanai Belanja Modal berdasarkan hasil Analisis Kontribusi yaitu diatas 100%, dimana sesuai dengan presentas identifikasi yang ditetapkan hal ini menunjukkan bahwa Arus Kas berkontribusi sangat besar dalam hal pendanaan Belanja Modal. Dalam hal ini sesuai dengan data yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran dan di analisis dengan menggunakan Analisis Kontribusi Arus Kas berkontribusi cukup besar dalam hal Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Karo khususnya pembangunan Jaringan Irigasi, dimana jaringan Irigasi merupakan aset penting mengingat Sumber Utama pendapatan Kabupaten Karo adalah melalui pertanian. Selain itu ketersediaan Arus Kas untuk Pemerintah Kabupaten Karo juga berkontribusi dalam Pembangunan Akses Jalan, Bangunan Gedung/Kantor dan Fasilitas pendukung sarana/prasarana publik lainnya.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Kondisi pengelolaan keuangan di kabupaten Karo selama 6 (enam) tahun anggaran yaitu mulai dari Tahun 2010-2015 tidak berjalan secara efektif dan efisien hal ini ditunjukkan dengan selalu adanya anggaran yang tidak terserap yaitu SiLPA.
2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2010-2015 memiliki Kontribusi yang kecil terhadap pendanaan Belanja Modal. Pendanaan Belanja Modal yang menggunakan dana SiLPA lebih didominasi untuk kegiatan di Dinas Pendidikan dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran juga Prgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di SKPD yagada di KabupatenKaro.
3. Arus Kas memiliki Kontribusi yang Sangat Besar dalam pendanaan Belanja Modal dengan persentase diatas 100%, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karo dalam pelaksanaan kegiatannya masih menggunakan bantuan dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Dana Transfer. Dalam hal ini, sesuai dengan Laporan Keuangan Daerah, Dana Transfer masih mendominasi.
4. Ketersediaan Belanja Modal yaitu dalam bentuk aset tetap memiliki peran yang cukupbesar dalam Peningkatan Pelayanan Infrastruktur dimana dengan Infrastruktur yang memadai akan memberikan dukungan yang cukup baik untuk peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Peningkatan Akses Jalan dan Peningkatan Sarana Prasarana Lainnya yang akan mendukung minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Karo. Selain itu, dengan pennyediaan aset melalui Belanja Modal membantu SKPD untuk bekerja secara efektif dengan tersedianya Sarana Prasana Kantor di masing-masing SKPD.

### B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel yang sama tetapi lokasi penelitian di Pemerintah yang lain di Sumatera Utara dan kemudian bandingkan dengan Pemerintah Kabupaten Karo.
2. Dengan adanya forum resmi yang disediakan pemerintah daerah yaitu melalui Musrenbangdesa dan Musrenbang kecamatan, masyarakat hendaknya memperhatikan dan melakukan evaluasi terhadap kinerjaPemerintah Daerah dan memberikan masukan terkait belum optimalnya kinerja pemerintah daerah, terutamadalam hal pembangunan infrastruktur yang dianggap masih kurang maksimal di masing-masing desadan kecamatan.

3. Bagi Pemerintah Daerah sebaiknya memperhatikan Pengelolaan Keuangan Daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Melakukan evaluasi terhadap serapan anggaran SKPD Per Tri Wulan sehingga sebelum tahun anggaran berakhir dapat dipastikan bahwa anggaran telah terserap dan kegiatan-kegiatan yang ada khususnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat telah berjalan secara baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Sularso, Restianto. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Tengah
- Haryanto. (2013). Pengaruh Informasi SILPA APBD dan Arus Kas terhadap penganggaran Belanja Modal berdasarkan klasifikasi Pemerintah Daerah menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2007
- Laksmi, Hadi. (2013). Pengaruh PAD, DAU, SILPA, Realisasi Anggaran dan penetapan Perda APBD terhadap Anggaran Pembangunan pada Pemerintah Kabupaten/Provinsi Jawa Tengah-DI. Yogyakarta 2007-2010
- Adiputa, DwiyantridanDarmada. (2015) Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SILPA terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai variabel intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali
- Megasari. (2015) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan Flypaper Effect pada perilaku oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota di Bali
- Hafiz, Tanjung. (2014). Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Pendekatan Teknis Sesuai dengan PP No 71/2010. Bandung : Alfabeta
- Baldroc Siregar. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung : Alfabeta
- Sujarweni. (2015) Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Pinjaman
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.